

Subsidi BBM dan Perekonomian Indonesia

**Bagian pertama
dari dua tulisan**

BUKU bertajuk *Subsidi BBM & Perekonomian Indonesia* ditulis oleh Y. Sri Susilo (Dosen FE UAJY). Kata pengantar buku ini ditulis oleh Prof. Lincolin Arsyad PhD (Ketua ISEI Cabang Yogyakarta/Dosen FEB UGM). Buku ini terdiri dari 8 (delapan) bab ini merupakan hasil riset atau kajian yang dilakukan oleh penulis selama 12 tahun terakhir. Launching, Bedah Buku dan Diskusi Ekonomi buku tersebut dilaksanakan di R.3.1 Pascasarjana Kampus Fakultas Ekonomi UAJY, Rabu (29/5/2013) pukul 09.00-12.00 WIB. Acara ini hasil kerja sama FE UAJY dengan ISEI Cabang Yogyakarta.

Penurunan subsidi BBM membawa konsekuensi logis kenaikan harga BBM bersubsidi. Penulis buku mencoba pertanyaan: Bagaimana dampak penurunan subsidi atau kenaikan harga BBM terhadap perekonomian Indonesia? Cakupan perekonomian mencakup aspek makro (inflasi, pertumbuhan ekonomi, ekspor dsb), sektoral, dan regional. Dampak terhadap pengangguran dan kemiskinan juga dibahas dalam buku ini. Terakhir disajikan dampak terhadap kualitas lingkungan.

Dari berbagai hasil simulasi yang pernah dilakukan oleh penulis buku ternyata penurunan subsidi BBM memang berdampak negatif terhadap perekonomian dalam jangka pendek, dalam hal ini terutama inflasi, sektoral, ekonomi makro, kemiskinan, dan pengangguran. Dampak berupa inflasi, sektoral, dan ekonomi makro dari aspek besaran (magnitude) relatif kecil. Dampak terhadap kemiskinan dan pengangguran harus diwaspadai.

Dari sisi kualitas lingkungan, berdasarkan indikator-indikator stressor SPM, SO₂, NO₂, Lead, CO,

BOD dan Metal maka penurunan subsidi BBM tersebut justru akan meningkatkan kualitas lingkungan. Hal ini terjadi karena output stressor atau emisi yang dihasilkan oleh aktivitas ekonomi mengalami penurunan dalam jangka pendek.

Dampak negatif penurunan subsidi BBM dalam jangka pendek dapat dapat dikurangi dengan diterapkan kombinasi kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal dilakukan dengan menerapkan jaring pengaman sosial (*social safety net*) oleh pemerintah. Di sisi lain, kebijakan moneter oleh Bank Indonesia dapat dilakukan dengan menurunkan jumlah uang beredar (MO) melalui instrumen menaikkan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

Kebijakan pengurangan subsidi BBM harus disertai dengan program kompensasi. Pelaksanaan program kompensasi yang tidak efektif justru akan meningkatkan kemiskinan. Sebaliknya jika program kompensasi dapat dilaksanakan dengan efektif dapat menekan kemiskinan. Kompensasi sebaiknya bukan dalam bentuk tunai (*non cash transfer*), dapat berupa asuransi dan jaminan kesehatan, bea siswa pendidikan, modal kerja UMKM, program padat karya serta beras untuk masyarakat miskin dan hampir miskin.

Kebijakan subsidi tidak dapat diberlakukan secara terus menerus. Di samping itu, jika subsidi terpaksa harus diberikan maka harus diberlakukan secara adil, selektif dan tepat sasaran dengan jangka waktu yang terbatas. Subsidi yang diberikan harus secara bertahap (*gradual*) dikurangi sehingga sampai jangka waktu tertentu subsidi dapat dihilangkan sama sekali. Pemerintah tidak perlu bimbang dan ragu untuk melaksanakan kebijakan mengu-

Oleh : Y Sri Susilo

rangi subsidi BBM, dengan catatan pemerintah harus memberikan informasi dan argumentasi yang memadai kepada masyarakat.

Diskusi ekonomi subsidi BBM

Membahas subsidi BBM, ada beberapa hal yang dapat disampaikan. *Satu*, disadari oleh pemerintah bahwa beban anggaran subsidi BBM semakin membengkak. Hal tersebut dikarenakan meningkatnya harga minyak mentah (*crude oil*) dan laju konsumsi BBM bersubsidi juga meningkat 10 persen per tahun. Besarnya subsidi BBM pada tahun anggaran 2013 telah ditetapkan sebesar Rp 193,8 triliun, namun beban subsidi bisa membengkak menjadi Rp 297,7 triliun. Hal tersebut terjadi jika konsumsi BBM bersubsidi melebihi kuota dan harga keekonomian BBM bersubsidi mencapai Rp 10.000,-. Dengan kondisi tersebut, jika pemerintah menurunkan subsidi BBM merupakan tindakan yang realistis.

Dua, kenaikan harga BBM yang terakhir terjadi pada tahun 2008, dengan demikian sudah 5 tahun harga BBM bersubsidi tidak berubah. Selama kurun waktu hampir 5 tahun tersebut, pemerintahan SBY sempat merencanakan kebijakan untuk membatasi konsumsi dan menaikkan harga BBM bersubsidi. Setelah terjadi pro dan kontra, pemerintah kemudian menunda dan membatalkan kebijakan tersebut. Pemerintah nampak ragu dalam memutuskan kebijakan untuk mengurangi subsidi BBM.

Tiga, pembatasan BBM bersubsidi sebenarnya telah direncanakan oleh pemerintah sejak tahun 2010 dan akan diterapkan pada tahun anggaran 2011 (KR, 23/11/2010). Rencana tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh pemerintah sampai dengan tahun anggaran 2012. Ke-

bijakan pembatasan dan sejenisnya tersebut pada dasarnya untuk membatasi lonjakan konsumsi BBM bersubsidi yang setiap tahun meningkat sekitar 10 persen. Konsumsi BBM bersubsidi setiap tahun selalu melewati batas kuota yang telah ditentukan.

Empat, pemerintah pada bulan April 2013 sempat merencanakan untuk menerapkan kebijakan harga berbeda untuk BBM bersubsidi (KR, 13/4/2013). Untuk kendaraan umum roda empat (plat kuning) dan sepeda motor masih mendapat subsidi penuh, sedangkan kendaraan roda empat pribadi (plat hitam) subsidi akan dikurangi. Dengan demikian untuk kendaraan umum harga BBM bersubsidinya tetap. Di sisi lain untuk kendaraan roda empat plat hitam harganya BBM bersubsidinya naik. Rencana kebijakan dua harga tersebut mendapat kritik dan ditentang banyak pihak, dan pemerintah memilih membatalkan kebijakan tersebut. Selanjutnya pemerintah memilih untuk menerapkan kebijakan satu harga untuk BBM bersubsidi.

Lima, pemerintah SBY seharusnya tidak ragu-ragu untuk secara bertahap mengurangi subsidi BBM dan pada akhirnya menghapus subsidi BBM. Seperti halnya kebijakan yang diterapkan di sektor industri pengolahan, dimana sejak Agustus 2005 tidak lagi mengkonsumsi BBM bersubsidi.

Jika pemerintah mempunyai keberanian untuk mengurangi subsidi BBM maka anggaran subsidi BBM dapat dialokasikan ke sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur ekonomi. Alokasi yang lain adalah untuk memberikan insentif kepada pihak-pihak yang mengembangkan energi alternatif non-BBM atau bio-energi.***

Y. Sri Susilo, Dosen Fakultas Ekonomi UAJY, Wakil Sekretaris ISEI Cabang Yogyakarta